

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur dan potensi penting dalam pembangunan yang berasal dari manusia dengan segala aktivitasnya. Dalam tinjauan segi ekonomis, sumber daya manusia dimaksudkan sebagai semua kegiatan manusia yang produktif dalam mengembangkan dan memanfaatkan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat. Menurut Soetomo (2009:221), pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pembangunan masyarakat pada dasarnya menyangkut dua hal yaitu (1) peningkatan serta pengembangan kualitas dan (2) pemanfaatannya melalui berbagai peluang, aktivitas, dan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan dan pengembangan kualitas dimaksudkan untuk menambah potensi dan kemampuan sumber daya manusia tersebut, sehingga lebih mampu berperan sebagai subjek dan objek pembangunan. Tersedianya peluang dalam bentuk berbagai usaha dan aktivitas dimaksudkan untuk mengubah sumber daya potensial menjadi aktual dan produktif. Dalam pemanfaatan sumber daya manusia juga membutuhkan adanya peluang dan kesempatan untuk berusaha dan beraktivitas agar potensi yang dimiliki oleh setiap manusia mampu terlaksana secara nyata.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas serta pemanfaatannya kedua sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia laki-laki dan sumber daya manusia perempuan harus mampu berjalan secara optimal dan seimbang. Apabila kedua sumber daya manusia tersebut tidak mampu berjalan secara optimal dan seimbang, maka dapat menimbulkan sebuah kesenjangan sosial. Menurut Tukiran dan Pande M.Kurtanegara dkk(2007:246), akibat dari kesenjangan sosial tersebut menyebabkan perempuan menjadi dekat dengan kemiskinan sebagai akibat dari adanya ketidakseimbangan hubungan gender dan peminggiran perempuan dalam setiap aspek kehidupan karena adanya budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia. Kesenjangan sosial masih sering terjadi di masyarakat pedesaan karena masih memposisikan perempuan hanya bisa menjadi ibu rumah tangga saja. Memang, perempuan sebagai ibu dan istri tugasnya adalah melayani, memiliki tanggung jawab mengasuh anak dan mengurus rumah keluarganya. Namun kebanyakan para perempuan sebagai ibu rumah tangga sering menggunakan waktunya secara tidak

efektif karena setelah mereka menyelesaikan tugas rumah tangganya, para perempuan tersebut menganggur. Akibatnya, potensi diri yang dimiliki oleh para kaum perempuan tersebut tidak bisa tergali dan dikembangkan sehingga adanya anggapan oleh kaum laki-laki untuk perempuan khususnya di masyarakat Jawa bahwa perempuan itu hanya sebagai “Konco Wingking” yang maksudnya bahwa perempuan hanya sebagai teman di dapur, sumur, dan kasur. Maksud dari teman di dapur yaitu perempuan memiliki tugas memasak dan mengurus semua urusan dapur untuk keperluan makan suami dan keluarganya. Sebagai teman di sumur maksudnya perempuan tugasnya mencuci seluruh pakaian anggota keluarganya. Sedangkan teman di kasur maksudnya perempuan mempunyai kewajiban sebagai seorang istri yaitu melayani suaminya akan kebutuhan sexnya. Adanya anggapan seperti itu akan dialami perempuan dalam kesehariannya. Oleh karena itu, perempuan membutuhkan akses untuk mengembangkan potensi dirinya yang bisa diwujudkan dalam sebuah kegiatan-kegiatan produktif yang mampu menghasilkan nilai-nilai perekonomian dan menciptakan perempuan yang mandiri, unggul, dan produktif.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan yang salah satunya melalui sektor pembangunan pertanian. Menurut Sunyoto Usman (2010:41), tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Fokusnya terutama terarah pada usaha menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan.

Di pedesaan, sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada pada sektor pertanian. Namun dalam perkembangan kegiatan pertanian, peran perempuan belum mampu terlihat dikarenakan adanya anggapan bahwa kegiatan pertanian hanya mampu dilakukan oleh laki-laki saja dan perempuan hanya bisa menikmati dan mengolah hasil panen dari kegiatan pertanian. Adanya anggapan tersebut mampu mendiskriminasi peran perempuan pada sektor pertanian. Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang dan posisinya pun harus sejajar sama dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan pembangunan negara termasuk didalamnya peran perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi pertanian. Oleh karena itu, perempuan juga

wajib mendapatkan penyuluhan dan pendidikan keterampilan di bidang pertanian. Dan yang lebih penting, perempuan juga memerlukan akses untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga menjadi perempuan yang produktif dan mandiri dalam bidang ekonomi pertanian maupun bidang lainnya yang tujuannya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan meliputi kerja produktif, reproduktif, privat dan publik yaitu lebih dikenal sebagai pemberdayaan. Pemberdayaan memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal. Keberdayaan dalam konteks masyarakat khususnya perempuan adalah kemampuan individu (perempuan) yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan perempuan yang bersangkutan. Keberdayaan perempuan ini merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat perempuan bertahan, mengembangkan diri, dan mencapai kemajuan. Pemberdayaan perempuan merupakan segenap usaha untuk menjadikan perempuan berkemampuan, berdaya, dan menjadi perempuan mandiri. Kaitan dengan perempuan mandiri adalah perempuan yang berdiri kokoh atas dasar potensi atau kekuatan dan kemampuan sendiri serta selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perempuan mandiri mampu memproduksi, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhannya tanpa terlalu tergantung pada pihak lain.

Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan salah satu desa yang sudah melakukan upaya-upaya pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Upaya yang mengarah pada pemberdayaan perempuan tersebut dilakukan karena keadaan perempuan Desa Kradinan yang tidak memiliki akses untuk menggali potensi diri dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh setiap perempuan. Dan mayoritas mata pencaharian penduduk desa Kradinan adalah berada pada sektor pertanian. Namun belum banyak kaum perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Oleh karena itu, melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tergabung dalam Gapoktan Desa Kradinan melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pertanian.

Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang bernama Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari merupakan wadah tempat berkumpulnya segenap petani yang memiliki lahan pertanian ataupun tidak memiliki, terutama kaum ibu tani yang pemanfaatan lahannya belum maksimal sehingga belum dapat mencapai hasil produksi seperti yang diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Terbentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini didorong oleh kesadaran dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan hasil produksi pertanian lebih maksimal sehingga mampu menambah pendapatan perekonomian dan menjadikan perempuan berkemampuan dalam hal ketahanan pangan rumah tangga menuju kesejahteraan keluarga.

Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, peran perempuan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan lebih berbasis agropolitan. Agropolitan merupakan sebuah program yang memanfaatkan kawasan pedesaan dengan basis pertanian secara luas yaitu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Selama kurang lebih 3 tahun Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari sudah menjalankan kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui sektor pertanian yang berbasis agropolitan tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan peran dan produktivitas perempuan anggota kelompok tani sebagai pengurus rumah tangga agar mampu berupaya dalam peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga menuju pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam kegiatannya, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari selalu berupaya dalam hal peningkatan pendapatan dalam mengelola di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan dengan membuat inovasi dalam peningkatan nilai jual dari bidang tersebut. Walaupun para anggota kelompok tani tersebut memiliki kesibukan dalam urusan rumah tangga, tetapi mereka selalu meluangkan waktu untuk melakukan pertemuan dan mempraktekkan hasil dari serapan ilmu, keterampilan, dan inovasi-inovasi yang sudah diberikan pada saat adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan ataupun Dinas-dinas yang terkait.

Jadi, dalam rangka pemberdayaan perempuan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai wadah atau akses bagi perempuan untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya serta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan pedesaan melalui kegiatan pertanian untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Dan keefektivan atau tidaknya peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari tersebut menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam rangka pemberdayaan perempuan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berdasarkan masalah-masalah dan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis ingin mengambil judul Skripsi tentang “ **Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi perempuan dan ketahanan pangan rumah tangga ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?
3. Bagaimana tingkat efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam pemberdayaan perempuan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi perempuan dan ketahanan pangan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a) Diharapkan berguna sebagai bahan perbandingan sebagai referensi literature bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.
 - b) Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kemampuan akademis dan wawasan pengetahuan tentang efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Peneliti
Sebagai bahan masukan, perbandingan, dan penerapan ilmu pemberdayaan masyarakat desa yang diperoleh di bangku kuliah, dalam konteks kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya mengenai pemberdayaan perempuan.
 - b) Bagi masyarakat umum
Diharapkan mampu memberikan pengertian yang konkret tentang pentingnya peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan, hingga manfaat dari adanya pemberdayaan perempuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
 - c) Bagi pemerintah terkait
Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi salah satu bahan pemikiran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa pada umumnya dan pemberdayaan perempuan pada khususnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah menegaskan beberapa istilah atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Mutiarin dan Zainudin, 2014: 95-96). Sedangkan The Liang Gie berpendapat efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu

dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. (Mutiarin dan Zainudin, 2014:97-98).

2. Peran

Menurut Poerwadaminta dalam kamus bahasa Indonesia (2005:753) yang dikutip dalam Naskah Publikasi yang berjudul Peran Kepala Desa Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan, mendefinisikan peran adalah segala sesuatu yang menjadi bagian/memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya segala sesuatu hal/peristiwa. (Marliyana, 2015: 7)

3. Kelompok Wanita Tani (KWT)

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan kumpulan ibu-ibu istri petani atau para wanita yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Kelompok Wanita Tani (KWT) juga merupakan wadah tempat berkumpulnya segenap wanita tani yang memiliki lahan pertanian maupun tidak, untuk bersama-sama meningkatkan pemanfaatan lahan yang belum maksimal sehingga dapat mencapai hasil produksi seperti yang diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

4. Pemberdayaan Perempuan

1) Pemberdayaan

Menurut Stewart (dalam Azang Awang, 2010: 46), pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan. Sedangkan menurut Mubyarto (dalam Azang Awang, 2010:46) menekankan dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

2) Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan merupakan sebuah proses untuk menjadikan posisi dan peran perempuan menjadi cukup kuat dan memiliki kekuasaan agar mampu berpartisipasi dalam sebuah pembangunan masyarakat. Pemberdayaan perempuan juga merupakan segenap usaha untuk menjadikan perempuan berkemampuan, berdaya, dan menjadi perempuan mandiri.

5. Agropolitan

Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Konsep agropolitan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan sumber daya hewan yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Agropolitan menjadi sarana dalam pembangunan kawasan pedesaan untuk menangani kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan.

F. Landasan Teori

1. Efektivitas

(1) Teori Efektivitas Organisasi

Menurut Gibson, 1995 (dalam Waluyo, 2007:84), bila mengikuti teori efektivitas organisasi, maka perspektifnya tidak akan terlepas dari penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Karena memang keefektifan organisasi merupakan fungsi keefektifan individu dan kelompok. Terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi keefektifan yaitu: pendekatan dalam mengidentifikasi keefektifan, yaitu : pendekatan menurut tujuan dan pendekatan menurut teori sistem.

Pendekatan menurut tujuan adalah untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pada pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.

Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan.

Menurut pandangan ini, efektivitas organisasi diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal ini, misalnya keuntungan lebih besar, maka organisasi makin efektif. Dari sisi lain, organisasi dapat dikatakan efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun. Menurut Indrawijaya, 1986 (dalam Waluyo, 2007: 84) menurut teori ini, efektivitas organisasi ditentukan oleh efisiensinya.

Menurut Etzioni dalam Indrawijaya, 1986 (dalam Waluyo, 2007:84) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya "**System model**" mencakup empat kriteria sebagai berikut :

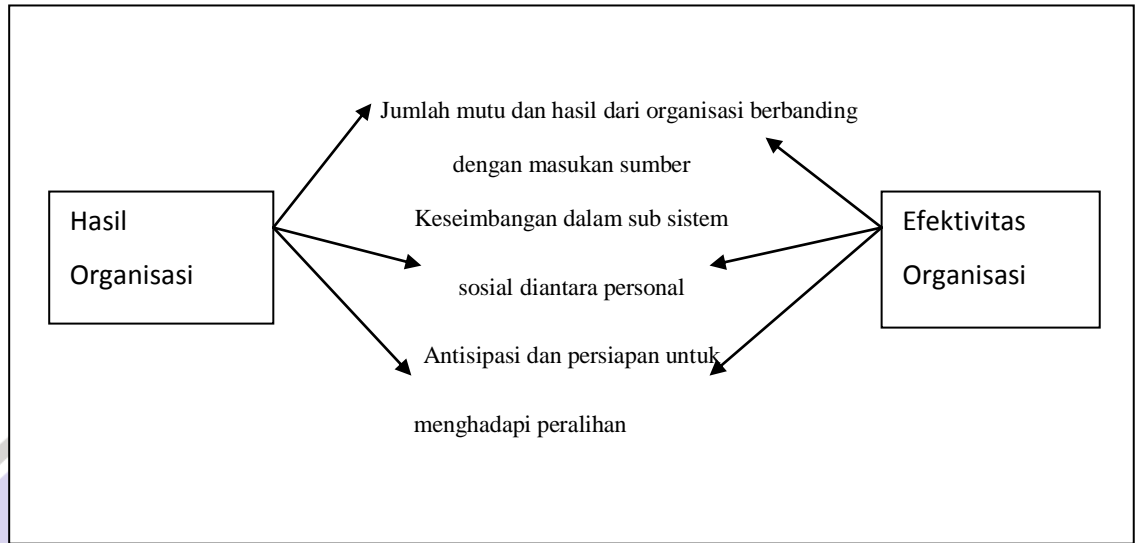
- a. Kriteria adaptasi ; dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- b. Kriteria integrasi ; yaitu pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi untuk menjadikan sosialisasi pengembangan konsesus dan komunikasi dengan beberapa macam organisasi lainnya.
- c. Kriteria motivasi anggota ; dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterkaitan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksana tugas pokok dan fungsi organisasi.
- d. Kriteria produksi ; yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah organisasi dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Efektivitas organisasi merupakan akhir (*ultimate criterion*) baik atau buruknya suatu manajemen. Tanpa adanya efektivitas, kesejahteraan organisasi dan kemauannya berada dalam bahaya. Para ahli manajemen sependapat, bahwa efektivitas merupakan tugas utama suatu manajemen. Terdapat berbagai ukuran tentang efektif tidaknya suatu organisasi. Menurut Sterrs, 1985 (dalam Waluyo, 2007:85) ada yang mengemukakan efektivitas itu sebagai mendapat keuntungan yang banyak, tetapi juga efektivitas itu diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan.

Duncan dalam Indrawijaya, 1986 (dalam Waluyo, 2007:86) menggambarkan beberapa unsur-unsur penting dalam efektivitas organisasi, seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1

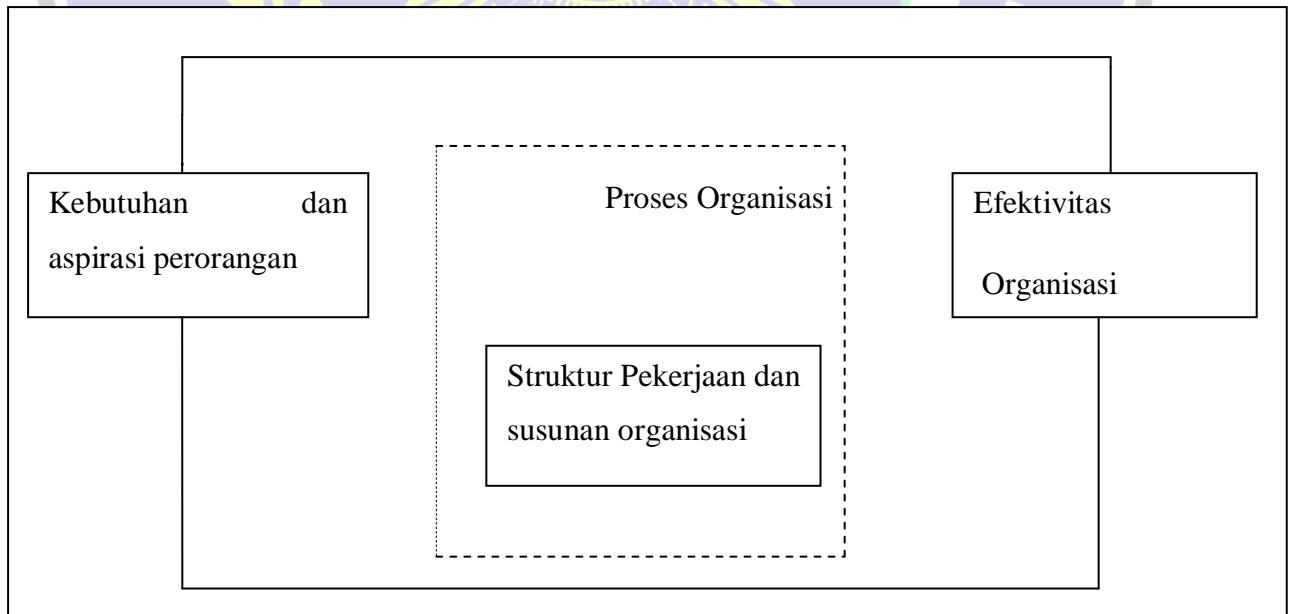
Unsur-Unsur Efektivitas Organisasi



Sumber : W. Jack Duncan dalam Adam Indrawijaya, 1986 (dalam Waluyo, 2007: 86)

Gambar 2

Model Efektivitas Organisasi



Sumber : Duncan dalam Indrawijaya, 1988 (dalam Waluyo, 2007: 87)

Menurut Mutiarin dan Zainudin, 2014:15, kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah suatu keputusan untuk mengatasi

permasalahan kesejahteraan masyarakat, untuk melakukan tujuan peningkatan kesejahteraan. Unsur kebijakan pembangunan kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dalam program pembangunan kesejahteraan masyarakat, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dalam mengukur dimensi efektivitas maka perlu dipertimbangkan kriteria-kriteria yang mendukung tentang permasalahan yang akan dikaji.

Menurut Gibson 1996 (dalam Mutiarin dan Zainudin, 2014:16), berpendapat bahwa ada beberapa kriteria efektivitas, yaitu :

- a. Kriteria jangka pendek- produktivitas
- b. Mutu
- c. Efisiensi
- d. Fleksibilitas dan kepuasan
- e. Pengembangan
- f. Kriteria jangka menengah-persaingan
- g. Kriteria jangka panjang-kelangsungan hidup

Berkaitan dengan efektivitas program pembangunan kesejahteraan masyarakat maka pengukuran efektivitas program adalah bagaimana program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut *Manpower Service Commision* (MSC), efektivitas didefinisikan sebagai pengukuran terhadap ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Suhana 1998 (dalam Mutiarin dan Zainudin, 2014:16), suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika outputnya sama atau sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan jika tidak sesuai, maka kegiatan tersebut tidak efektif. Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan.

Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat industri ditandai beberapa hal antara lain : produktivitas, efisien, dan kepuasan *stackholder*. Dalam kaitannya dengan ini, Cambel J.P (dalam Waluyo, 2014:16), mengungkapkan pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: (1) keberhasilan program, (2) keberhasilan sasaran, (3) kepuasan terhadap program, (4) tingkat input dan output, (5) pencapaian tujuan menyeluruh.

2. Kelompok Tani

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No :273/Kpts/Ot.160/4/2007 tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani, petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkatan satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Sedangkan Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

1) Ciri Kelompok Tani

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau permukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan, dan ekologi.
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

2) Unsur Pengikat Kelompok Tani

- a. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya.
- b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya
- c. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.

- d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya.
- e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

3) Fungsi Kelompok Tani

- a. Kelas Belajar : Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan lebih sejahtera.
- b. Wahana Kerjasama : Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- c. Unit Produksi : Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

3. Pemberdayaan

(1) Teori Pemberdayaan

Menurut Rob Brown 2004 (dalam Suparno, 2015:201), pemberdayaan erat hubungannya dengan profesionalisme yang pada awalnya selalu dimiliki oleh individual. Oleh karena itu, *empowerment* terjadi : “*when power goes to employees who the experiences a sense of ownership and control over*”. Menurut Noe *et.al.* 2004 (dalam Suparno, 2015:202), pemberdayaan merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. Menurut Robert dan Greene dalam Damanik dan Pattiasina 2009 (dalam Suparno, 2015:202) pemberdayaan adalah suatu proses bagaimana orang semakin cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kendali dan memengaruhi peristiwa dan institusi yang memengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Clutterbuck dalam Syarif Makmur 2008 (dalam Suparno, 2015:202) pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

2) Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Menurut Ambar Teguh 2004(dalam Suparno, 2015: 203) terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif, konatif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut.

Tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup, terciptanya lapangan kerja dan kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.

3) Strategi Pemberdayaan

Menurut Jim Iff yang dikutip dalam (Arini Mayanfa'uni, 2016:38) menjelaskan 3 strategi pemberdayaan yaitu :

- 1) Menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dapat dilihat sebagai pemberdayaan dalam konteks bahwa hal ini meningkatkan sumber daya, akses dan kesempatan bagi masyarakat.

Memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada rakyat juga merupakan strategi pemberdayaan yang penting dan oleh karena itu kebijakan untuk menjamin pendapatan cukup dapat disebut sebagai memberdayakan.

- 2) Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik dalam pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Tetapi ia menekankan pendekatan aktivis dan berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya melalui bentuk aksi langsung atau dengan memperlengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik.
- 3) Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadartahunan dalam menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam arena melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. Ini memasukkan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran, membantu masyarakat memahami masyarakat dan struktur operasi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya.

4) Tahapan Pemberdayaan

Tahapan pemberdayaan berfungsi untuk memandirikan masyarakat dalam berbagai kegiatannya. Peran tim pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitator ini akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Selanjutnya, Supriyanto, 2004 (dalam Ardhana Januar Mahardhani, 2014:65) menyebutkan tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahapan tersebut adalah:

Tahap 1. Seleksi lokasi

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat :

- a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif
- b) Pengembangan kelompok
- c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

d) Monitoring dan evaluasi partisipatif

Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

Setelah melakukan tahapan awal tersebut, tahapan pemberdayaan dapat ditinjau dari tingkatan hasil yang dicapai, yaitu :

- 1) Tahap kesejahteraan, dimana pemberdayaan masih berpusat pada peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat
- 2) Tahapan kesadaran kritis, yaitu tahapan dimana pemberdayaan telah mencapai tingkatan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis terhadap segala hal disekitarnya
- 3) Tahapan pengorganisasian, dimana pemberdayaan telah meningkat pada peningkatan kualitas organisasinya dan terus diupayakan untuk mampu mengambil keputusan-keputusan sekitar dirinya sendiri
- 4) Tahap kontrol, dimana masyarakat memiliki kemampuan mengontrol terhadap segala bentuk tindakan-tindakan atas perbuatan yang terkait dengan kehidupan mereka

4. Perempuan

1) Pengertian Konsep Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.

Gender berasal dari kata “*gender*” (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis

melainkan sosial budaya dan psikologis. Kata '*gender*' juga dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat (Herien Puspitawati, 2013:1). Menurut Wayan Sudarta, 2003:4 (dalam Agung Aryani, 2002 dan Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003) menjelaskan bahwa pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan antara pria dan wanita yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Menurut Wayan Sudarta, 2003:6 (dalam Bemmelen, 2002) mengemukakan beberapa ciri gender yang dilekatkan oleh masyarakat pada pria dan wanita. Perempuan memiliki ciri-ciri lemah, halus, emosional, dll. Sedangkan pria memiliki ciri-ciri kuat, kasar, rasional dll. Namun dalam kenyataannya ada wanita yang kuat, kasar, dan rasional. Sebaliknya ada pula pria yang lemah, lembut, dan emosional. Berkaitan dengan gender, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut :

- a) Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.
- b) Peran Reproduksi adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dll. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik.
- c) Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

2) Konsep Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.*” (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equity is the process of being fair to women and men . To ensure fairness, measure must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the results.*” (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki . Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya) (Herien Puspitawati, 2013: 5).

3) Perempuan dan Kegiatan Ekonomi

Menurut Tilly dan Scoot (1978) (dalam Sunyoto Usman, 2010: 115) mengatakan bahwa, pada proses transformasi ekonomi periode perkembangan pertama yaitu *the family-based economy*, rumah tangga masih menjadi basis dari kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi banyak dilakukan di dalam rumah. Itulah sebabnya pada saat itu hampir tidak ada perbedaan yang jelas antara

kegiatan ekonomi dan kehidupan domestik. Kerja dikonsepsikan sebagai aktivitas produktif bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Semua anggota keluarga (termasuk anak-anak) adalah tenaga kerja yang mempunyai kontribusi berarti dalam proses produksi. Perempuan (Ibu rumah tangga) berada pada posisi yang relatif sentral dalam keluarga karena harus bertanggungjawab atas semua pekerjaan yang ada di dalam rumah. Dengan demikian, perempuan mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Pada periode perkembangan pertama yaitu *the family-based economy*, perempuan sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga, melainkan juga terlibat dalam kegiatan di luar rumah, terutama di bidang pertanian. Bahkan di beberapa tempat dimana kota sudah mulai berkembang, perempuan berpartisipasi pula dalam kegiatan jasa dan perdagangan seperti penjaga toko, pengrajin, atau membuka warung-warung makanan. Meskipun demikian, kegiatan yang mereka lakukan tidak berdiri sendiri, tetapi tetap memiliki interdependensi dengan pria.

4) Agropolitan

1) Konsep Agropolitan

Pada awalnya, agropolitan merupakan konsep yang ditawarkan oleh Friedman dan Doulgas pada tahun 1975 atas pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri di beberapa negara berkembang di Asia yang mengakibatkan terjadinya berbagai kecenderungan, antara lain :

- 1) Terjadinya *hyperurbanization*, sebagai akibat terpusatnya penduduk di kota-kota padat
- 2) Pembangunan "*modern*" hanya terjadi di beberapa kota saja, sementara daerah pinggiran relatif tertinggal
- 3) Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif tinggi
- 4) Pembagian pendapatan yang tidak merata (kemiskinan)
- 5) Kekurangan bahan pangan, akibat perhatian pembangunan terlalu tercurah pada percepatan pertumbuhan sektor industri (*rapid industrialization*)
- 6) Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa (petani)
- 7) Terjadinya ketergantungan pada dunia luar

Secara konseptual, agropolitan ini diharapkan akan dapat memberikan sebuah solusi baru akan masalah pertanian berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Dalam konsep ini dimasukkan unsur urbanitas yang dianggap penting terutama dalam hal kenyamanan atas barang dan jasa publik (*public goods and services*) seperti halnya infrastruktur seperti jalan, pelayanan administrasi, pasar, dan modal transportasi setara kota. Dalam penerapannya, kawasan agropolitan dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

2) Ciri-ciri Kawasan Agropolitan

Rustiadi, 2007 (dalam Ardhana Januar Mahardhani, 2014:83) mengatakan bahwa suatu kawasan agropolitan haruslah memiliki ciri-ciri yaitu sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari :

- 1) Pusat agropolitan mencakup :
 - a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (*agricultural trade/transport center*)
 - b. Penyedia jasa pendukung pertanian (*agricultural support service*) seperti perbankan, asuransi, dan pusat penelitian dan pengembangan
 - c. Pasar konsumen produk non-pertanian (*non-agricultural consumers market*)
 - d. Pusat industri pertanian (*agro-based industry*)

- e. Penyedia pekerjaan non pertanian (*non-agricultural employment*)
 - f. Pusat agropolitan dan hinterland-nya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten)
- 2) Unit-unit kawasan pengembangan (*hinterland*) yang mencakup :
- a. Pusat produksi pertanian (*agricultural production*)
 - b. Intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*)
 - c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand for non-agricultural goods and services*)
 - d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversification*)
- 3) Terdapatnya sektor unggulan yang merupakan :
- a. Sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya
 - b. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal)
 - c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor
- 4) Memiliki sistem kelembagaan yang mendukung berkembangnya kawasan agropolitan seperti adanya organisasi petani, organisasi produsen agribisnis, dan lain-lain.
- 5) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis seperti jalan, sarana irigasi, air bersih, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, listrik, pusat informasi pengembangan agribisnis, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

3) Pengembangan Kawasan Agropolitan

Konsep pengembangan kawasan agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal. Salah satu ide pendekatan pengembangan perdesaan adalah

mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan. Dalam konteks pengembangan akses terhadap lahan pertanian dan air, devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian (Pranoto, 2005).

Suatu kawasan agropolitan, kota pertanian tidak hanya mempunyai fungsi utama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong pertumbuhan perdesaan dan desa-desa di sekitarnya melalui pengembangan ekonomi yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha pertanian (*on farm and off farm*), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain. Batasan suatu kawasan agropolitan ini lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* dan *economic of scope*.

Selain itu, pengembangan kawasan agropolitan tidak semata-mata ditujukan pada pembangunan fisik material saja, tetapi juga sekaligus dikaitkan dengan pembangunan masyarakat secara langsung. Konsep yang digunakan dalam pengembangan agropolitan antara lain :

1) Konsep Pendekatan Wilayah

Kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hierarki keruangan desa, yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya.

2) Konsep Pendekatan Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas, maka pengembangan kawasan agropolitan dengan pendekatan wilayah akan kurang mencapai hasil yang maksimal. Pengembangan sumber daya manusia ini akan terlaksana dan sesuai dengan harapan jika setiap komponen dan fungsi organisasi baik dari pusat maupun daerah memandang upaya pengembangan sumber daya manusia ini bukan sebagai unsur penunjang, melainkan bagian integral dari masing-masing fungsi organisasi (*integrative linkages*). Pemberdayaan dalam masyarakat ini sangat penting karena sumber

daya manusia di sini berperan aktif sebagai pelaku utama dalam keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan.

G. Definisi Operasional

1. Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Sedangkan peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu. Maka Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berperan sebagai wadah atau akses penting untuk pemberdayaan perempuan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan

Pemberdayaan perempuan merupakan segenap usaha untuk menjadikan perempuan berkemampuan, berdaya, dan menjadi perempuan mandiri serta memiliki peran dan kekuasaan agar mampu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Sedangkan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu. Konsep agropolitan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan hewan yaitu pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Maka Pemberdayaan Perempuan berbasis Agropolitan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana usaha yang dilakukan untuk perempuan agar mampu menggali dan mengembangkan potensi serta SDMnya melalui kegiatan pertanian yang menggunakan konsep agropolitan, sehingga tercipta perempuan-perempuan yang produktif, berkemampuan, dan mandiri serta mampu menciptakan kesejahteraan rumah tangga dan berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Juliansyah, 2011:33) "Penelitian

kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.” Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Penelitian bentuk deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian diskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendiskripsikan bagaimana Efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam pemberdayaan perempuan berbasis Agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam hal ini organisasi desa yang terkait adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari yang merupakan salah satu kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

3. Teknik Pengambilan Informan

Dalam sebuah penelitian, informan sangat dibutuhkan karena dengan adanya informan maka kita sebagai peneliti akan mengetahui info yang pasti tentang hal yang kita teliti. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai fakta-fakta atau kenyataan yang tahu tentang bagaimanakah efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Juliansyah Noor, 2011:155). Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari Pendamping Penyuluh Lapangan(PPL), Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT), Sekretaris, dan 3 Anggota. Alasan kenapa

memilih 6 informan tersebut adalah karena 6 informan tersebut mengetahui hal yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki (Muhammad Idrus, 2009:101). Dengan demikian, teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang Efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan (Juliansyah Noor, 2011:138). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data diskriptif tentang Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

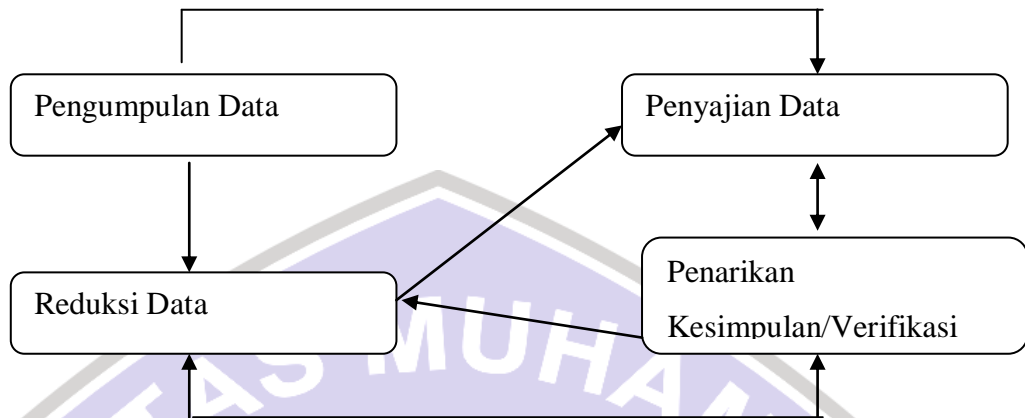
c. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam (Juliansyah Noor, 2011:141). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang letak geografis dan letak demografis Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009:147) mengajukan model analisa data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman sebagai berikut :

Gambar 3
Analisis Data Penelitian



Tahapan proses analisa data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal yaitu dengan menggunakan teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun proses pengambilan data kualitatif biasanya dilakukan dengan cara *partisipant observation* (pengamatan terlibat), yaitu dengan cara peneliti melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang ditelitinya, sejauh tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat tersebut.
- 2) Reduksi data. Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

- 3) Penyajian data atau Display Data. Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Kegiatan reduksi dan penyajian data merupakan aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisa data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan *display* data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.
- 4) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencacatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat). Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali dilapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya.